

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 36 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua, memiliki Tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut:

2.1.1 Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua

Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 36 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

1. SATPOL PP dan PBD merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah.
2. SATPOL PP dan PBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua

SATPOL PP dan PBD mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, SATPOL PP dan PBD mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penjabaran uraian tugas dan fungsi SATPOL PP dan PBD, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

2.1.3. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua

1. Susunan Organisasi SATPOL PP dan PBD, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, terdiri atas:
 - 1) Seksi Penyuluhan dan Pengawasan;
 - 2) Seksi Penyidikan dan Penindakan; dan
 - 3) Seksi Pembinaan, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dan Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas :
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2) Seksi Protokoler dan Kerjasama Antar Aparat; dan
 - 3) Seksi Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
 - 1) Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - 2) Seksi Pemetaan dan Penanganan Kebakaran; dan

- 3) Seksi Penyiapan Sarana dan Prasarana.
 - f. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pengungsi, terdiri atas :
 - 1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - 2) Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi; dan
 - 3) Seksi Logistik.
 - g. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas :
 - 1) Seksi Rehabilitasi;
 - 2) Seksi Rekonstruksi; dan
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Struktur Organisasi SATPOL PP DAN PBD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua

2.2.1 Keadaan Pegawai

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua, didukung dengan 610 orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 133 orang dan Non Aparatur Sipil Negara (ASN) Tenaga Kontrak 477 orang, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Menurut Status, Pangkat, Golongan dan Eselon

Status Kepegawain/Pangkat	Gol/Ruang	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Non Eselon	Total
1	2	3	4	5	6	7
A. ASN						
Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-	-	

	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	-	-	1
	Pembina Tingkat I	IV/b	-	3	-	1	4
	Pembina	IV/a	-	2	1	5	8
	Penata Tingkat I	III/d	-	1	12	9	22
	Penata	III/c	-	-	3	6	9
	Penata Muda Tingkat I	III/b	-	-	2	10	12
	Penata Muda	III/a	-	-	-	12	12
	Pengatur Tingkat I	II/d	-	-	-	4	4
	Pengatur	II/c	-	-	-	17	17
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-	-	-	34	34
	Pengatur Muda	II/a	-	-	-	6	6
	Juru Tingkat I	I/d	-	-	-	2	2
	Juru	I/c	-	-	-	2	2
	Juru Muda Tingkat I	I/b	-	-	-	-	-
	Juru Muda	I/a	-	-	-	-	-
C.	NON PNS (HONORER)						
	Honorar/Kontrak (PTT)	-	-	-	-	477	477
	Jumlah						610

Sumber : Satpol PP dan PBD Prov. Papua, 2020

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

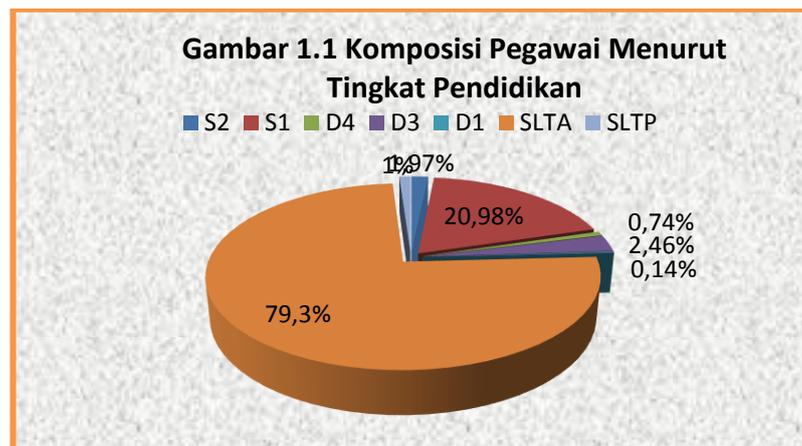
Status Kepegawaian/ Pangkat		S2	S1	D4	D3	D1	SLTA	SLTP	JMLH	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	ASN									
	Eselon II	1	-	-	-	-	-	-	1	0,18
	Eselon III	1	5	-	-	-	-	-	6	0,98
	Eselon IV	8	10	-	-	-	-	-	18	2,95
	Gol IV	4	2	-	-	-	-	-	6	0,96
	Gol III	4	21	-	-	2	10	-	37	6,06
	Gol II	-	-	-	-	6	55	-	61	10,61
	Gol I	-	-	-	-	-	-	4	4	0,98

Renstra SATPOL PP Prov. Papua 2020 - 2025

C.	NON PNS									
	Kontrak/ PTT	1	86	-	10	1	375	4	477	84,4
	Jumlah	19	121	4	10	9	437	8	610	100
	%	2,22	20,9 8	0,72	2,46	0,14	79,3	1,97		

Sumber : Satpol PP dan PB Provinsi Papua, 2020

Dilihat dari kualifikasi pendidikan sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan bencana daerah Provinsi Papua masih di dominasi oleh tingkat pendidikan SLTA 79,3 %, Sarjana S1 20,98%, Pasca Sarjana S2 2,22%, D3 2,46%, D4 0,72, dan SLTP 1,97%. Sumber daya manusia yang diharapkan dapat mengimbangi dinamika tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua sebagai aparat Penyelenggara Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Serta Penegak Peraturan Daerah. Dari presentase diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan SLTA lebih tinggi dari pada Sarjana maupun Pascasarja. Dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



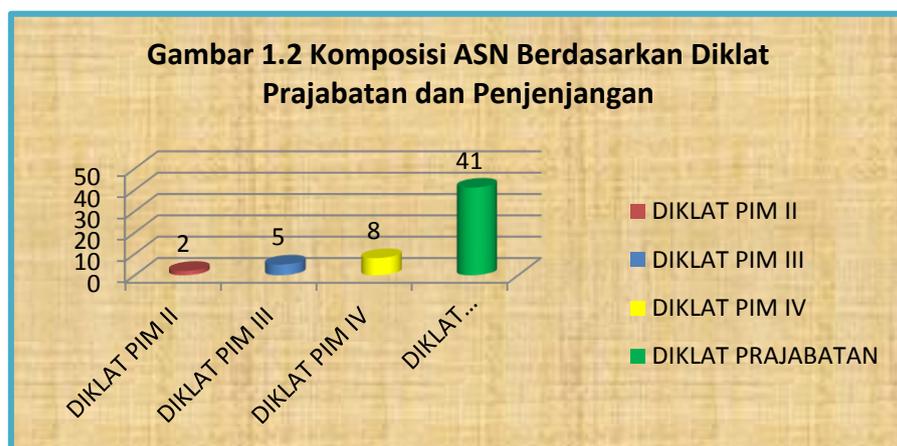
Untuk melihat komposisi pegawai Satpol PP dan PBD Provinsi Papua berdasarkan diklat prajabatan dan penjenjangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Diklat Prajabatan dan Penjurangan

NO	Jumlah Pendidikan Penjurangan	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Diklat Pim II	2
2	Diklat Pim III	5
3	Diklat Pim IV	8
4	Diklat Prajabatan	41

Sumber : Satpol PP dan PBD Provinsi Papua, 2020

Dilihat dari kualifikasi tingkat pendidikan dan latihan prajabatan dan penjurangan Satuan Polisi Pamong Praja dan PBD Provinsi Papua masih didominasi oleh Golongan II sebanyak 41 orang dan yang terendah mengikuti PIM II sebanyak 2 orang.



2.2.2 Keadaan Sarana dan Prasarana

Keadaan sarana dan prasarana (aset) penunjang kegiatan Satpol PP dan PBD Provinsi Papua dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut ini :

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana Aset Mobilitas Operasional Penunjang Kegiatan Satpol PP dan PBD Provinsi Papua

NO	Golongan	Jumlah sarana dan Prasarana		
		Satpol	BPBD	2020
A	GEDUNG			
1	Gedung kantor permanen	2	2 UNIT	4 UNIT
2	Gedung /Gudang	2	2UNIT	4 UNIT
3	Gedung pos jaga permanen	2	1 UNIT	3 UNIT
B	SARANA MOBILITAS			
1	Roda 4	10	5 unit	15 unit
2	Roda 2	14	8 unit	22 unit
3	Truk Patroli	2	-	2 unit
4	Mobil pemadam kebakaran	2	-	2 unit
5	Mobil resque komando	-	2 unit	2 unit
6	Mobil Water threatment	-	1 unit	1 unit
7	Mobil dapur Umum Lapangan	-	4 unit	4 unit
8	Mobil Truck serbaguna	-	1 unit	1 unit
9	Mobil Ambulance	-	1 unit	1 unit
10	Perahu Speed boat/Fiber 9Inc	-	1 unit	1 unit
11	Perahu karet	-	5 unit	5 unit
12	Mesin motor temple 10 dan 60	-	2 unit	2 unit
13	PK	-	2 unit	2 unit
14		-	1 unit	1 unit
15	Mesin motor temple 80 PK	-	1 unit	1 unit
16	Mesin motor temple 40 PK	-	1 unit	1 unit
17	Mesin motor temple 25 PK	-	1 unit	1 unit
18	Mobil komunikasi	-	1 unit	1 unit
19	Mobil toilet		1 unit	1 unit
20	Light tower portable		2 unit	2 unit
C	Water treatmen portable Genset 2000Watt			
21	Alat-alat Operasional	35 unit	-	35 unit
22	Persenjataan / Keamanan	35 unit	-	35 unit
23	Tameng	100 unit	-	100 unit
24	tameng	5r unit	-	5r unit
25	Helem Dakura	76 unit	-	76 unit
26	Borgol	50 unit	-	50 unit
D	Senter			
27	Pentung	68 unit	-	68 unit
28	Lampu lilin	3 unit	-	3 unit

29	Alat Kominikasi/Dokumentasi Hendy Talk Camera Nikon/Canon Mega Phone	5 unit		5 unit
----	--	--------	--	--------

Sumber : Asset Satpol PP & PBD Prov. Papua 2020

2.2.3 Keadaan Keuangan

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta melaksanakan mandat yang diberikan oleh Gubernur Papua diperlukan adanya dana pendukung. Selama ini dana untuk mendukung operasional Kegiatan ditunjang dari satu sumber yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan penanggulangan bencana daerah Provinsi Papua, dengan anggaran setelah perubahan untuk tahun 2020 adalah Rp. 66.179.029.160 (Enam puluh enam milyar seratus tujuh puluh Sembilan juta dua puluh Sembilan ribu seratus enam puluh rupiah), dari anggaran tersebut terbagi menjadi 2 kelompok belanja yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

Anggaran dalam Belanja Tidak Langsung terdiri dari Gaji dan tunjangan dengan besaran anggaran Rp. **22.669.937.140,-**

2. Belanja Langsung

Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. **43.509.092.02000** terdiri dari 10 Program dan 37 kegiatan dengan rincian anggaran per belanja sebagai berikut :

Tabel 1.5
ANGGARAN PER KEGIATAN DAN PER BELANJA SATPOL PP
DAN PBD PROVINSI PAPUA 2020

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN
	BELANJA BTL + BL	65.314.830.160	66.179.029.160
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	23.115.113.140	22.669.937.140
	Belanja Pegawai		
B	BELANJA LANGSUNG	42.199.717.020	43.509.092.020
I	Program pelayanan Administrasi perkantoran		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	9.900.000	9.800.000

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	294.600.000	421.100.000
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	29.700.000	201.900.000
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	121.824.400	121.824.400
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	71.000.000	71.000.000
6	Penyediaan alat tulis kantor	135.387.850	135.387.850
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	127.800.000	127.800.000
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan gedung kantor	5.600.995	5.600.995
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	21.000.000	21.000.000
10	Penyediaan barang logistik kantor	12.000.000	12.000.000
11	Penyediaan makanan dan minuman	10.624.650.000	6.739.575.000
12	Rapat – rapat koor dinasi dan konsultasi keluar daerah	3.013.275.000	1.577.500.000
13	Penyediaan jasa pengamanan	18.278.676.000	18.045.331.200
II	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	1.884.555.200	2.783.186.000
1	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	1.053.500.000	1.178.736.000
2	Perlengkapan gedung kantor	76.450.000	40.000.000
3	Pengadaan Meubeler	0	158.344.800
4	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	80.000.000	80.000.000
5	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / Operasional	674.605.200	674.605.200
6	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0	476.500.000
7	Sewa gedung	0	175.000.000
III	Program peningkatan disiplin Aparatur	66.500.000	66.500.000
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	66.500.000	66.500.000
IV	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	675.500.000	0
1	Pendidikan dan pelatihan Formal	410.000.000	0
2	Pendidikan dan pelatihan Non Formal	265.500.000	0
V	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	122.810.210	122.810.210
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	45.992.800	45.992.800
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	10.537.800	10.537.800
3	Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun	16.417.800	16.417.800

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN
4	Penyusunan RKA,dan perubahan APBD	49.861.810	49.861.810
5	Peningkatan kapasitas PPID	0	0
6	Penyusunan Standar pelayanan Minimal (SPM)	0	0
VI	Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	721.170.050	93.542.640
1	Monitoring dan Evaluasi Pelanggaran -Pelanggaran perda	221.527.675	0
2	Pelatihan dan pembinaan PPNS	300.000.000	0
3	Pengendalian Unjuk rasa dan kerusuhan massa di lingkungan pemerintah provinsi Papua	199.642.375	93.542.640
VII	Program pemberdayaan masrakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	1.036.512.620	0
1	Pelatihan dasar bagi satuan polisi perlindungan masyarakat (LINMAS)	143.326.485	0
2	Rakenis satpol PP se – Provinsi Papua	544.736.560	0
3	Pemberdayaan Satlinmas dan masyarakat dalam pengamanan Swakarsa se - papua	348.449.57	0
VIII	Program peningkatan pemberantasan penyakit masrakat (pekat)	1.740.534.410	0
1	Sosialisasi bahaya miras dan Narkoba bagi generasi Muda di Daerah	1.642.418.400	0
2	Bimtek Standar Pelayanan Minimal (SPM)	98.116.010	0
IX	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	2.009.123.490	12.625.215.720
1	Rapat Inventari sasi kesediaan kebutuhan Logistik PB	93.237.955	0
2	Simulasi Peralatan Teknis Penanggulangan Bencana	356.823.500	0
3	Penyusunan Rencana konti jensi PB kesiap siagaan	447.698.300	447.698.300
4	Pembentukan Desa kampung Tangguh	266.871.300	0
5	Bimtek dan pembentukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	190.728.300	0
6	Rapid Assesment Pasca Bencana	349.923.350	207.190.440
7	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pasca Bencana	93.934.315	10.462.358.315
8	Pengembangan Sistem Informasi BPBD (Operasional Pusdalops)	0	125.423.875
9	Operasional pengendalian Pemadam kebakaran	209.906.470	209.906.470
10	Mobilisasi TRC	0	119.000.000

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN
11	Penyusunan Peraturan terkait kebencanaan	0	112.021.500
12	Persiapan dan perencanaan pengadaan tanah relokasi bagi korban bencana banjir bandang luapan air danau sentani kabupaten jayapura Tahun 2019	0	941.616.820
13	Operasional Posco Induk Covid-19	0	0
X	Program peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	1.264.096.795	327.918.005
1	Penegakan ketentraman dan ketertiban Umum	0	106.099.735
2	Patroli Wilayah	135.037.500	135.037.500
3	Pengamanan dan Pengawasan Protokoler KDH/ pejabat penting	86.780.770	86.780.770
4	Gelar pasukan Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat	1.042.278.525	0

Sumber : DPA Satpol PP dan PBD Provinsi Papua, 2020

2.3 Kinerja Pelayanan Satpol PP dan PBD Provinsi Papua

Kinerja pelayanan Satpol PP dan PBD Provinsi Papua belum dapat di ukur dikarenakan institusi ini masih baru dibentuk pada tahun 2019 dengan menggunakan Peraturan Gubernur No 39 Tahun 2019 tentang Penggabungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi 1 (satu) SKPD baru yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua, yang mana penggabungannya baru dijalankan pada tahun 2020 ini.

Hal inilah yang menyebabkan penyusunan Renstra kali ini merupakan penyusunan Renstra akibat penggabungan 2 SKPD tersebut.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP dan PBD Provinsi Papua

2.4.1 Tantangan Yang Dihadapi dalam Pengembangan Pelayanan Satpol PP dan PBD Provinsi Papua

Tantangan yang Dihadapi dalam Pengembangan Pelayanan Satpol PP dan PBD Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pelaksanaan perda dan perkara dapat dilihat dari maraknya kegiatan ekonomi masyarakat yang melanggar perda dan perkara.
2. Adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap aparat Satpol PP.
3. Adanya potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana kebakaran.
4. Luasnya wilayah pelayanan Satpol PP dan PBDD Provinsi Papua yang terdiri dari 29 Kabupaten/Kota, dengan luas areal 32.027.839 hektar dengan kondisi topografinya yang cenderung dikelilingi gunung, bukit dan lembah. Menyebabkan kesulitan dalam mencapai lokasi bencana.
5. Provinsi Papua termasuk daerah di Indonesia dengan tingkat resiko bencana yang cukup tinggi, yaitu untuk bencana gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, dan abrasi pantai.
6. Masih minimnya tenaga relawan terlatih dalam menghadapi penanganan darurat bencana.
7. Masih minimnya dana yang di peruntukan bagi pelaksanaan kegiatan penanganan bencana.
8. Masih minimnya aturan daerah yang ada terkait penanggulangan bencana.
9. Adanya beberapa Kabupaten di Provinsi Papua yang belum memiliki BPBD. Sebagai perpanjangan tangan BPBD Provinsi Papua di daerah.
10. Masih Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurangan resiko bencana.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP dan PBD Provinsi Papua

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Satpol PP dan PBD Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

1. Dinamika perkembangan produk hukum daerah.
2. Adanya tuntutan dari masyarakat untuk peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

3. Pentingnya peningkatan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
4. Semakin terlatihnya aparaturnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua melalui program pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis Penanggulangan Bencana.
5. Semakin sadarnya aparaturnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua untuk mensosialisasikan arti pentingnya pengurangan resiko bencana di sekolah – sekolah, tempat ibadah, hotel dan juga perbankan.
6. Semakin baiknya kerjasama dengan Instansi Teknis terkait di daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pencegahan dan penyebarluasan informasi penanggulangan bencana.
7. Memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk perluasan jangkauan pelayanan korban bencana.
8. Memanfaatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis bagi para petugas lapangan Penanggulangan Bencana.
9. Terbangunnya kerjasama dan kemitraan dengan Instansi Teknis terkait melalui MoU.